

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan akses terhadap pekerjaan, informasi, teknologi, dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan (Bashori dan Listyani, 2024). Kelangkaan pemenuhan kebutuhan dasar, keterbatasan akses terhadap pendidikan, serta kesulitan dalam memperoleh pekerjaan merupakan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kemiskinan. Dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan bersifat kompleks dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Salah satu konsekuensi yang muncul akibat permasalahan kemiskinan tersebut adalah meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pemerintah sebagai aktor utama memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam merumuskan kebijakan dan menyusun program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat khususnya dalam menangani permasalahan sosial. Salah satu kota besar di Indonesia adalah Bandung. Peningkatan PMKS sebanding dengan peningkatan tingkat kemiskinan di Kota Bandung. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung melaporkan bahwa pada awal Maret 2021 terdapat sekitar 3.000 penduduk di Bandung yang mengalami kemiskinan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Selain itu, data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercatat pada awal pandemi tahun 2020 sebanyak 136.000 orang mengalami peningkatan menjadi 139.000 orang pada Januari 2021. Artinya, sekitar 3.000 PMKS telah meningkat di antara anak-anak yang hidup di jalanan, anak terlantar, pengemis dan gelandangan, serta fakir miskin

(Palau, 2021). Menurut Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, terdapat beberapa penyebab meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kini disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kota Bandung. Peningkatan tersebut umumnya berkaitan dengan melemahnya kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah satu faktor utamanya adalah bertambahnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa awal pandemi, yang membuat banyak orang kesulitan memperoleh pekerjaan dan akhirnya terpaksa mengemis di jalanan.

Dinsos mengakui bahwa dalam menangani masalah PPKS di Kota Bandung, ada beberapa hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Karena jumlah tenaga kerja yang terbatas, jangkauan petugas juga terbatas (Palau, 2021). Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut relokasi menjadi alternatif untuk memperluas dan pemeratakan akses terhadap layanan dasar yang selama ini belum terjangkau secara optimal oleh PPKS.

Pemerintah Jawa Barat menerapkan kebijakan program relokasi ke Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi untuk PPKS. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi memulai program penanganan PPKS perkotaan pada akhir tahun 2024. Pada tahap awal pelaksanaan program, tercatat sebanyak 98 kepala keluarga (KK) dengan total 384 jiwa direncanakan untuk direlokasi ke rumah susun. Dari jumlah tersebut, 33 KK berasal dari Bandung dan 15 KK dari Cimahi yang akan dipindahkan ke Apartemen Transit Rancaekek. Adapun 50 KK lainnya yang berasal dari Kabupaten Bandung akan menempati Rusunawa Solokan Jeruk. (Diskominfo Kota Bandung, 2024).

Selain relokasi ke rusun, pemerintah juga menyediakan pelatihan keterampilan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan PPKS memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja maupun dalam membangun usaha mandiri. Dengan hunian yang lebih teratur dan fasilitas yang lebih baik di rusun, diharapkan dapat meningkatkan kualitas

hidup mereka serta memberikan akses yang lebih mudah terhadap layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Relokasi pada dasarnya suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemindahan mereka dari kawasan yang dianggap tidak layak huni, seperti daerah rawan bencana, kawasan kumuh, atau wilayah dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung kesehatan dan keselamatan, menuju permukiman yang lebih aman, sehat, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai fasilitas sosial. Namun, relokasi tidak hanya sekadar perpindahan fisik, melainkan juga melibatkan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, keberhasilan relokasi sangat bergantung pada bagaimana proses sosial di dalamnya dapat dikelola secara baik, termasuk penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai bagi para warga yang direlokasi.

Proses relokasi yang dialami oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak hanya bermakna sebagai upaya penyediaan hunian yang layak, tetapi juga membangun realitas sosial yang baru. Relokasi ke rumah susun (rusun) menuntut PPKS untuk melakukan proses penyesuaian terhadap berbagai aturan, norma, dan tatanan sosial yang berlaku di lingkungan baru. Perubahan ini tidak semata-mata bersifat fisik, melainkan juga menyentuh dimensi sosial dan kultural yang mendalam. PPKS harus menyesuaikan dengan struktur sosial yang berbeda, membangun kembali jaringan sosial yang sempat terputus, serta menyesuaikan diri dengan mekanisme baru dalam mengakses layanan kesejahteraan sosial.

Bagi PPKS, relokasi ke Rusun Solokan Jeruk membawa berbagai perubahan dalam kehidupan mereka. Sebelum relokasi, sebagian besar penghuni hidup dalam kondisi yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi maupun tempat tinggal. Setelah menempati rusun, mereka mulai menjalani kehidupan dalam lingkungan yang lebih tertata, memiliki akses terhadap fasilitas yang lebih memadai, serta mendapatkan berbagai program pemberdayaan dari pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan

perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat dianalisis menggunakan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Himes dan Moore. Menurut Himes dan Moore, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur sosial, pola hubungan sosial, serta cara hidup masyarakat. Perubahan tersebut dapat terjadi akibat adanya kebijakan, program pembangunan, maupun perubahan lingkungan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Relokasi PPKS ke Rusun Solokan Jeruk dapat dipahami sebagai salah satu bentuk intervensi sosial yang berpotensi menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang perubahan sosial pasca relokasi, tetapi sejauh penelurusan peneliti belum ada yang meneliti mengenai perubahan kehidupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pasca relokasi ke rusun. Maka dirasa penting karena belum ada literatur yang membahas penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul **“Perubahan Kehidupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pasca Relokasi ke Rusun Solokan Jeruk Kabupaten Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa masalah terkait Perubahan kehidupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pasca relokasi ke Rusun Solokan Jeruk kabupaten Bandung. Adapun masalah-masalah yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan pola interaksi PPKS. Sebelum relokasi, banyak PPKS hidup dalam komunitas yang saling mengenal dan tidak semua anggota komunitas lama ikut pindah.
2. PPKS sering mendapat label negatif, Masyarakat sekitar atau bahkan penghuni rusun lain membentuk persepsi negatif terhadap mereka.

3. Lokasi Rusun yang jauh dari tempat kerja, menyebabkan PPKS kesulitan dalam mempertahankan atau meningkatkan taraf hidup.
4. Perbedaan budaya dengan tetangga baru. Dapat menimbulkan konflik karena latar belakang sosial atau budaya yang berbeda.
5. Adanya masalah psikologis seperti merasa terasing atau terpinggirkan, dan perasaan tidak diterima oleh masyarakat sekitar atau penghuni lama rusun.
6. Terdapat hambatan dalam proses adaptasi dengan nilai dan norma baru, yang tidak mudah bagi PPKS.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pasca relokasi ke Rusun Solokan Jeruk Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana proses perubahan kehidupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pasca relokasi ke Rusun Solokan Jeruk Kabupaten Bandung?
3. Apa saja faktor penghambat perubahan kehidupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pasca relokasi ke Rusun Solokan Jeruk Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pasca relokasi ke Rusun Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui proses perubahan kehidupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pasca relokasi ke Rusun Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat perubahan kehidupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pasca relokasi ke Rusun Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Secara Akademik dan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sejumlah pihak. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan perubahan sosial dan kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas relokasi masyarakat dan perubahan kehidupan kelompok rentan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, pengelola rusun, dan pihak terkait dalam mengevaluasi program relokasi serta pemberdayaan PPKS. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai perubahan kehidupan yang dialami PPKS setelah menempati Rusun Solokan Jeruk.

F. Kerangka Pemikiran

Relokasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ke rumah susun (rusun) Solokan Jeruk merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat rentan yang tidak memiliki tempat tinggal maupun pekerjaan tetap. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian yang layak, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup para PPKS melalui pemberian pelatihan keterampilan dan pendampingan sosial agar mereka mampu memperoleh penghasilan, menjadi mandiri, serta keluar dari lingkaran kemiskinan (Baszas, 2024).

Pasca proses relokasi, para PPKS menghadapi dinamika sosial yang cukup kompleks karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang baru. Struktur kehidupan di rusun sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya, di mana sebagian besar PPKS sebelumnya hidup di lingkungan yang minim aturan sosial. Kehidupan di rumah susun

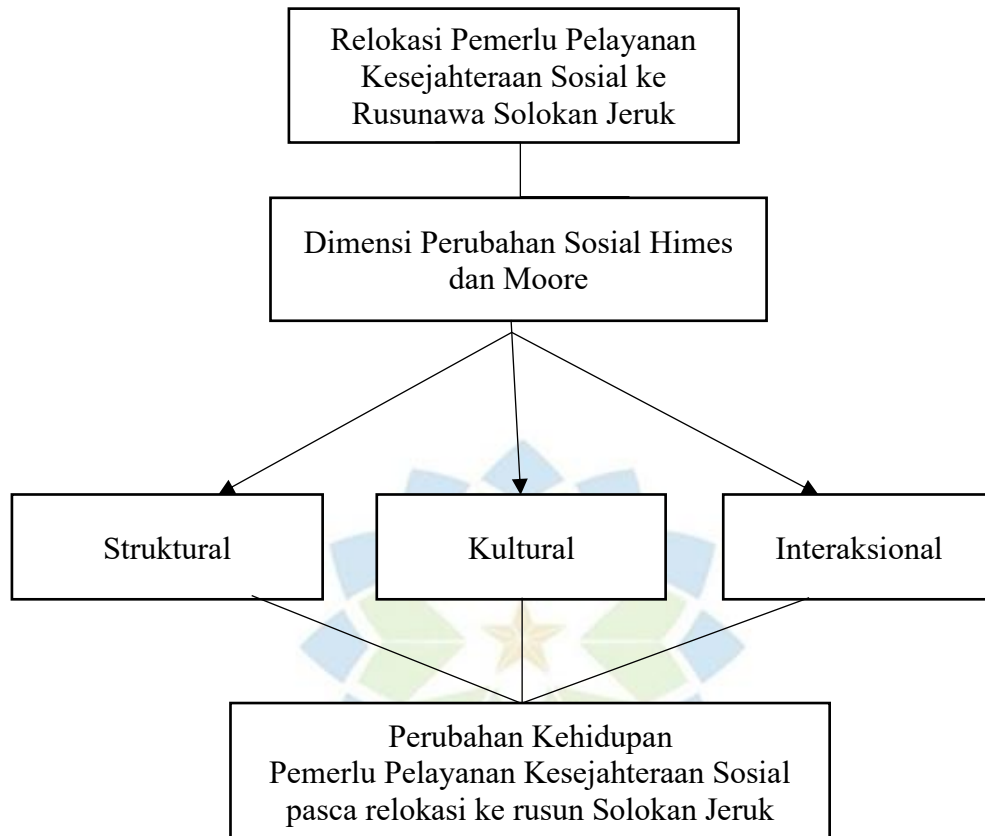
menuntut mereka untuk menyesuaikan diri dengan tata tertib dan pola hidup yang lebih teratur, mulai dari pembatasan ruang pribadi, kewajiban berbagi fasilitas umum, hingga penerapan aturan bersama yang mengatur kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Penyesuaian ini memerlukan kesadaran sosial yang tinggi karena setiap individu harus belajar hidup berdampingan dengan penghuni lain yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam.

Untuk memahami perubahan yang terjadi pada kehidupan PPKS pasca relokasi, penelitian ini menggunakan Teori Perubahan Sosial yang dikemukakan oleh Himes dan Moore. Menurut Himes dan Moore, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur sosial, pola hubungan sosial, dan pola kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan, program pembangunan, maupun perubahan lingkungan sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, relokasi PPKS ke Rusun Solokan Jeruk dipandang sebagai faktor yang mendorong terjadinya perubahan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, perubahan kehidupan PPKS dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu perubahan kondisi ekonomi, perubahan kondisi sosial, dan perubahan kondisi tempat tinggal serta kualitas hidup. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kehidupan PPKS berubah setelah menempati Rusun Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan perubahan kehidupan yang dialami oleh PPKS pasca relokasi serta memahami dampak yang ditimbulkan oleh program relokasi terhadap kesejahteraan mereka.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti, (2025)

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dipaparkan perubahan kehidupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pasca relokasi ke rusun dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori dimensi perubahan sosial yang dikemukakan oleh Himes dan Moore. Karena menurut Himes dan Moore Menurut pandangan Himes dan Moore, perubahan sosial dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi struktural, dimensi kultural, dan dimensi interaksional. Dimensi struktural mengacu pada perubahan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat, seperti perubahan peran, status, dan lembaga sosial. Dimensi kultural berkaitan dengan perubahan nilai, norma, pengetahuan, serta kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat akibat adanya inovasi dan penerimaan unsur-unsur baru. Sementara itu, dimensi interaksional mengacu pada perubahan pola hubungan dan interaksi sosial antarindividu maupun kelompok, seperti frekuensi komunikasi, kerja sama, dan partisipasi

sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk memahami berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari suatu proses perubahan sosial.

